

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara adalah salah satu tolak ukur dalam menilai perekonomian sebuah negara, begitu pun dengan perbandingan antara jumlah utang negara dan pendapatannya. Tidak sedikit negara yang berujung miskin bahkan menjadi negara gagal. Salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kemunduran itu terjadi adalah ketidakmampuan negara dalam mengelola keuangannya dengan baik dan terjebak dalam masalah utang negara (Sungkono, 2007:25).

Pada praktiknya negara-negara pada umumnya memang memiliki utang luar negeri. Dana dari utang tersebut lazimnya digunakan untuk investasi jangka panjang demi kesejahteraan warganya, baik pada sektor pendidikan, pembangunan infrastruktur, transportasi, pengelolaan sumber daya, kesehatan, dan lain sebagainya (Junaedi, 2018 : 565). Negara sebesar Amerika Serikat pun termasuk salah satu negara dengan utang terbesar. Namun dengan perkenomian yang besar juga Amerika tetap dalam kondisi aman terkait pembayaran utangnya (<https://id.tradingeconomics.com/country-list/external-debt> diakses pada 15 Maret 2019).

Suatu negara akan bermasalah dalam utang jika besar utangnya melebihi kondisi perekonomian pada negara tersebut. Hal inilah yang terjadi pada Yunani. Yunani adalah salah satu negara yang mengalami masalah besar dalam utang. Krisis utang yang terjadi pada Yunani dalam 1 dekade terakhir telah menjadi suatu isu global

dan menarik perhatian masyarakat internasional. Isu Grexit atau keluarnya Yunani dari keanggotaan Uni Eropa pun mencuat dan mengguncang perekonomian dunia. Nama Yunani seolah identik dengan kebangkrutan (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019).

Akar permasalahan krisis utang Yunani ini adalah lemahnya struktur perekonomian negara yang disertai dengan tingginya defisit anggaran, serta tingginya rasio utang terhadap GDP (*Gross Domestic Bruto*). Secara kronologis, krisis ini berawal pada kisaran tahun 2008-2009 saat Yunani mengalami dampak dari krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Keadaan yang melemahkan setiap negara ini juga terjadi pada Yunani. Keadaan ekonomi Yunani yang menjadi tidak stabil kemudian meluas dengan tingginya defisit anggaran dan perbandingan rasio utang yang lebih tinggi dari GDP (Simanjuntak & Wijanarka, 2016:20).

Dengan keadaan yang fluktuatif setelah diterapkannya kebijakan Austerity pada tahun 2010, Pemerintah Yunani secara resmi mengajukan permohonan *bailout* dari EC (European Commission), ECB (European Central Bank), dan IMF (International Monetary Fund), yang kemudian disebut sebagai Kreditor Troika. Pada Mei 2010, Kreditor Troika memberikan *bailout* sebesar 110 milyar Euro dengan bunga sebesar 5,5% selama 3 tahun untuk menyelamatkan Yunani dari masalah gagal membayar utang (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani> diakses pada 15 Maret 2019).

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Yunani dibawah Perdana Menteri yang menjabat saat itu, George Papandreou pada tahun 2010 mengeluarkan

serangkaian kebijakan *Austerity* atau upaya penghematan dengan pemotongan anggaran rutin tertentu. *Austerity* disahkan berupa pembekuan pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintah, pengurangan bonus, dan pengurangan pembayaran lembur. Selain itu juga *Austerity* berupa pembekuan pembayaran pensiun, kenaikan pajak BBM, rokok, alkohol, dan barang mewah, serta pemotongan gaji pegawai sektor publik (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019).

Memburuknya kondisi perekonomian negara sangat berimbas secara langsung pada situasi politik domestik. Kebijakan-kebijakan *austerity* yang dikeluarkan dalam tempo yang sangat cepat telah merubah banyak hal besar dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kemudian mengakibatkan aksi unjuk rasa yang beberapa kali terjadi. Tidak sedikit yang disertai kekerasan bahkan memakan korban jiwa, contohnya pada aksi bom molotov di Bank Marfin Eganatia cabang Stadiou Street yang mengakibatkan 3 orang terbunuh (<https://www.keeptalkinggreece.com/2010/05/05/3-dead-at-marfin-banktragedy-crime-negligence/> diakses pada 15 Maret 2019).

Bailout yang diberikan oleh Kreditor Troika dicairkan secara bertahap dalam bentuk dana talang dengan melihat perkembangan ekonomi Yunani dari waktu ke waktu. Pada Juli 2010, masyarakat kembali diwajibkan atas penerapan kebijakan lain dari pemerintah. Parlemen Yunani mengesahkan reformasi sistem pensiun sebagai salah satu syarat utama yang diminta kreditor untuk pencairan dana. Reformasi sistem pensiun ini meliputi kenaikan usia pensiun dari 60 tahun menjadi 65 tahun untuk

pekerja wanita (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 15 Maret 2019).

Dengan asumsi adanya ketidakstabilan dalam merumuskan kebijakan ekonomi negara, pada 17 Juni 2011 Perdana Menteri Papandreou memutuskan perlunya ada *reshuffle* kabinet. Langkah ini kemudian menjadi titik awal munculnya isu-isu baru di tengah kondisi negara yang semakin kacau. Akibat dari situasi politik yang tidak kondusif selama tahun 2011 serta akibat dari ketidakpastian di dalam pemerintahan mengenai kelanjutan *bailout*, Perdana Menteri Papandreou juga mengajukan referendum untuk melanjutkan atau menghentikan pinjaman dengan berbagai syarat *austerity* yang harus dilakukan sebagai konsekuensi, tetapi dibatalkan untuk diajukan (https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110617_greeceseshufle diakses pada 15 Maret 2019).

Mempertimbangkan perekonomian Yunani yang tidak juga membaik di tahun 2011, pada 21 Februari 2012 Kreditor Troika kembali memberikan *bailout* kedua sebesar 130 milyar Euro. Pinjaman tersebut disertai dengan persyaratan berupa pelaksanaan seluruh program *austerity*, reformasi struktural, dan privatisasi aset pemerintah. Total *bailout* kemudian mencapai 135% GDP Yunani (<https://www.nytimes.com/2012/03/15/business/global/greece-gets-formal-approval-for-second-bailout.html> diakses pada 20 Maret 2019).

Masyarakat tentu kecewa atas kebijakan pemerintah yang dibuat, namun langkah ini justru telah membuat perekonomian negara membaik secara pesat. Seolah

dua sisi mata uang, keadaan ekonomi yang membaik terjadi bersamaan dengan keadaan politik di pemerintahan yang goyah dan bermasalah.

Januari 2015 adalah masa *snap election* atau pemilihan umum secara serentak. Dua partai politik yang bersaing saling mengkampanyekan upaya-upaya dalam menangani krisis yang terjadi. Satu partai mengedepankan kebijakan untuk terus menerima *bailout* dari kreditor untuk membantu membayar utang negara, meskipun dengan konsekuensi berbagai kebijakan *austerity* yang harus diterapkan tetapi bisa dikatakan sangat membebankan masyarakat. Pesaing lainnya justru mengedepankan kebijakan untuk menghentikan negara dari siklus utang pada kreditor dan menghentikan seluruh kebijakan *austerity* yang harus dilaksanakan masyarakat. Partai SYRIZA yang berkampanye menolak kebijakan *austerity* pada akhirnya memenangkan pemilu dan memimpin negara diatas krisis yang terus-menerus memburuk. (<https://www.bbc.com/news/av/uk-politics-30852725/greek-election-syriza-win-would-scare-european-leaders> diakses pada 15 Maret 2019).

Keadaan politik negara terus mengalami ketidakstabilan, termasuk langkah-langkah pemerintah dalam membuat kebijakan yang seolah tidak berujung pada penyelesaian masalah. Tahun 2015 bisa dikatakan sebagai tahun terberat sepanjang krisis ekonomi meruntuhkan Yunani, karena utang negara yang terus membengkak dan utang terhadap kreditor troika juga menjadi beban baru bagi negara yang sedang bermasalah. Masyarakat diberatkan dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan kehidupan mereka sementara pemerintah sebagai penjamin kehidupan masyarakat justru bermasalah secara internal.

Pada 29 Juni 2015, pemerintah memberlakukan *bank closure* dan *capital control* sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini dikarenakan cadangan keuangan perbankan yang tidak mencukupi kebutuhan publik. Banyak bank yang ditutup untuk menghindari penarikan uang secara besar-besaran. Perbankan Yunani hanya melayani transaksi rekening pemerintah, lembaga sektor publik, dan asuransi. Total kumulatif dari rekening bank dibatasi sebesar 420 Euro perminggu. Transaksi masyarakat yang dilakukan pada bank antarnegara pun dibatasi. Hal ini sangat mempengaruhi kegiatan bisnis bagi masyarakat pelaku bisnis. Selain itu juga sangat mempengaruhi kehidupan mahasiswa atau pekerja asing yang sangat penting sekali menggunakan transaksi bank antarnegara (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 20 Maret 2019).

IMF mengkonfirmasi kegagalan Yunani dalam membayar cicilan utang yang jatuh tempo pada 30 Juni 2015 sebesar 1,6 milyar Euro. Yunani menjadi negara Eropa pertama yang gagal membayar cicilan utang karena jatuh tempo pada IMF (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150701101840-78-63507/imf-pastikan-yunani-gagal-bayar-utang> diakses pada 21 Maret 2019).

Keadaan ini semakin memperburuk keadaan negara. Pemerintah melakukan berbagai negosiasi untuk berusaha mengurangi krisis yang terjadi. Pada 19 Agustus 2015, *bailout* ketiga sebesar 86 milyar Euro diberikan oleh Kreditor Troika untuk dengan permintaan 201 kebijakan ekonomi sebagai syarat utama pencairan dana (<https://www.thebalance.com/what-is-the-greece-debt-crisis-3305525> diakses pada 21 Maret 2019).

Sejak tahun 2016, perekonomian Yunani mengalami peningkatan secara perlahan, meskipun pada waktu tertentu kembali fluktuatif. Krisis ekonomi tentu merupakan suatu hal yang sangat besar, dapat mempengaruhi hubungan antara Yunani dengan negara lainnya, terutama dalam keberadaan Yunani sebagai salah satu negara Uni Eropa. Yunani yang masuk dalam keanggotaan Uni Eropa pada 1 Januari 1981 memiliki cerita tersendiri (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/greece_en diakses pada 22 Maret 2019).

Uni Eropa terbentuk dari sebuah sejarah panjang dalam kurun waktu tahun 1951 hingga 1992. Integrasi yang dilakukan negara-negara di dalamnya tidak hanya melibatkan kesediaan negara untuk menjadi anggota, tetapi juga kesediaan untuk mengintegrasikan kebijakan makro ekonomi, baik fiskal maupun moneter, mobilitas tanpa batas yang dilakukan melalui visa Schengen, kesatuan kepabeanan dan disempurnakan melalui Traktat Maastricht. Untuk mempermudah aktifitas kerjasama perekonomian diantara negara anggota, Uni Eropa mengeluarkan sebuah mata uang bersama atau tunggal yaitu Euro. Hal ini bermula dari asumsi untuk mempertahankan stabilitas mata uang serta menghapus biaya transaksi perdagangan (Perwita & Yani, 2014 : 111-112).

Uni Eropa awalnya dibentuk untuk mendistribusikan kesejahteraan antarnegara anggota. Hal ini dilakukan melalui kerjasama ekonomi yang kuat antarnegara anggota. Namun kenyataannya, krisis yang dialami oleh Yunani menunjukkan bahwa ada kemungkinan ketidakmampuan Yunani dalam pengaturan atau manajemen terkait ekonomi makro negaranya, salah satunya dengan penerapan kebijakan ekonomi

yang menyesuaikan dengan Uni Eropa, namun pada praktiknya tidak mampu dilakukan Yunani secara maksimal.

Bergabungnya Yunani dalam Komunitas Eropa sebenarnya diharapkan dapat membantu perekonomian Yunani melalui pasar bersama, namun Yunani kesulitan beradaptasi dengan kompetisi pasar karena industri di Eropa sudah lebih maju dan mapan. Ketika Yunani memutuskan bergabung dengan Uni Eropa dan mengganti mata uangnya dengan Euro di tahun 2001, asumsi awal adalah keadaan ekonomi negara yang akan terus tumbuh. Namun asumsi ini ternyata terpatahkan ketika krisis global terjadi di tahun 2008. Pada saat itu semua negara di Eropa mengalami dampaknya, namun karena Yunani merupakan salah satu negara yang memiliki hutang sangat banyak, Yunani merasakan dampak yang paling besar (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150701115330-134-63540/penjelasan-singkat-soal-krisis-yunani> diakses pada 30 Maret 2019).

Yunani resmi bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1981. Sebagai negara anggota Uni Eropa, tentunya semua kebijakan negara baik itu kebijakan ekonomi maupun politik akan berpengaruh terhadap stabilitas Uni Eropa, karena pada Januari 2001 Yunani juga resmi bergabung dengan *eurozone* dan mulai mengadopsi *euro* sebagai mata uang menggantikan *drachma* sebagai mata uang Yunani sebelumnya.

Bila ditelusur ke belakang, Yunani menjadi satu-satunya anggota Uni Eropa yang tidak dapat memenuhi kriteria atau syarat menjadi anggota Uni Eropa dikarenakan oleh inflasi, defisit anggaran, utang, dan suku bunga tinggi yang dimiliki oleh Yunani. Kemudian Yunani berusaha memperbaiki perekonomiannya dengan

program penghematan dan usaha ini membuahkan hasil positif. Yunani akhirnya dapat memenuhi kriteria; inflasi 2,1%, defisit anggaran 1,7% dari PDB (di bawah 3% ditetapkan Perjanjian *Maastricht*) dan resmi tahun 2001 Yunani dapat bergabung dengan Uni Eropa. Dalam perjalanan selanjutnya, Yunani tergabung dalam *eurozone*. Namun, pada akhirnya terkuak fakta bahwa data-data ekonomi yang memuluskan langkah Yunani menjadi bagian dari *eurozone* adalah semua hasil rekayasa.

Ketika mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Uni Eropa, Yunani merupakan negara dengan angka korupsi yang tinggi, struktur administrasi publik yang tidak transparan, dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lemah. Ketika diharuskan untuk menerapkan sistem ekonomi yang terintegrasi di Uni Eropa, Yunani belum sejajar secara ekonomi dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, sehingga penyeragaman mata uang Euro membuat Yunani seolah seperti bayi yang dipaksa menjadi dewasa. Hal ini menyebabkan perputaran uang yang tidak seimbang antara Yunani dengan negara sekitarnya. Puncaknya ketika dunia diguncang krisis pada tahun 2008, Yunani sangat terpuruk karena terlilit utang yang melebihi GDP. Dalam situasi ini, Uni Eropa sebagai integrasi negara yang terdiri dari Yunani di dalamnya tentu akan terkena dampak pula dari terpuruknya Yunani di masa krisis (Simanjuntak & Wijanarka, 2016 : 20-21).

Krisis ini telah memberikan dampak secara eksternal dengan melemahkan stabilitas ekonomi di Uni Eropa, kemudian membuat Uni Eropa beserta IMF membantu dengan memberikan *bailout* yang sebagian besar adalah dana milik negara-negara anggota Uni Eropa sendiri, sehingga memunculkan desakan dari sesama anggota Uni

Eropa untuk mengeluarkan Yunani dari Uni Eropa, namun Uni Eropa tetap membantu dan mempertahankan Yunani.

Fenomena krisis ini adalah suatu hal yang sangat besar sehingga tidak sedikit penelitian yang sudah dilakukan untuk membahas masalah ini. Oleh karena itu, peneliti mengangkat beberapa contoh penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Penelitian pertama adalah penelitian dari Herdi Harja K., mahasiswa program studi Hubungan Internasional dari Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini merupakan skripsi yang dibuat pada tahun 2014 dengan judul “Peranan Uni Eropa dalam Menangani Krisis Ekonomi Yunani”. Penelitian ini membahas bagaimana langkah yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam membantu menangani krisis Yunani serta kendala-kendala yang dialaminya selama membantu menangani krisis ini. Hal ini membantu peneliti karena data pada penelitian ini memberikan petunjuk bagi peneliti untuk secara mendalam dapat memahami apa saja langkah yang dilakukan Uni Eropa untuk membantu Yunani. Penelitian ini juga membantu mengarahkan peneliti dalam mencari referensi dalam melakukan penelitian terkait krisis Yunani.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Alfian Al-‘Ayubby, mahasiswa program studi Hubungan Internasional dari Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini merupakan skripsi yang dibuat pada tahun 2012 dengan judul “Dampak Krisis Ekonomi Amerika Serikat Tahun 2008 terhadap Industri Manufaktur Indonesia”. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh yang terjadi setelah krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 terhadap industri manufaktur Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori krisis ekonomi negara, sehingga memberikan petunjuk bagi peneliti untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana teori yang tepat untuk membahas krisis Yunani. Penelitian ini juga membahas krisis ekonomi Amerika Serikat secara mendalam sehingga membantu peneliti memahaminya, karena pembahasan ini berkaitan dengan penyebab krisis Yunani juga yang berawal dari dampak terjadinya krisis tersebut.

Penelitian lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ferdian, mahasiswa program studi Hubungan Internasional dari Universitas Pasundan. Penelitian ini merupakan skripsi yang dibuat pada tahun 2017 berjudul “Krisis Eurozone: Kegagalan Kebijakan Moneter European Central Bank (ECB) Menjaga Stabilitas Finansial di Kawasan Eurozone.” Penelitian ini membahas bagaimana krisis Eurozone di tahun 2010 merupakan salah satu kejadian besar di tahun 2010. Sebagai bentuk dari integrasi ekonomi dan moneter regional di kawasan Eropa yang selama ini menjadi kawasan percontohan bagi kawasan lainnya, kini Eurozone mengalami tantangan yaitu terjadinya instabilitas finansial akibat terjadinya krisis utang Yunani di tahun 2009 dan diikuti krisis di empat negara lainnya pada tahun 2010, hingga kelima negara ini disingkat dengan PIIGS: Portugal, Ireland, Italy, Greece dan Spain. Di balik krisis ini, ECB sebagai Bank Sentral Eropa merupakan institusi yang memegang tanggung jawab atas stabilitas finansial di kawasan Eurozone melalui Common Monetary Policy. Penelitian ini dapat membantu peneliti dalam memahami bagaimana perekonomian di Uni Eropa saling berkaitan satu sama lain, bagaimana krisis Yunani yang terjadi dapat

mempengaruhi stabilitas finansial di kawasan Eurozone, dan besarnya peran European Central Bank juga yang membuat kebijakan bagi stabilitas kawasan.

Penelitian lain adalah penelitian oleh Asrie Karwanti, mahasiswi program studi Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini merupakan skripsi yang dibuat pada tahun 2013 dengan judul “Implikasi Pengelolaan Krisis oleh Konsorsium Troika terhadap Politik Domestik Yunani”. Penelitian ini membahas kebijakan-kebijakan *austerity* yang dikeluarkan oleh Konsorsium Troika dan penerapannya terhadap politik domestik Yunani. Penelitian ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana kebijakan *austerity* yang dibuat oleh Konsorsium Troika dapat secara langsung mempengaruhi politik domestik Yunani secara berkesinambungan.

Selain itu juga terdapat penelitian oleh Rina Dwihana Fitriani, mahasiswi program studi Ilmu Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini merupakan skripsi yang dibuat pada tahun 2013 dengan judul “Rasionalisasi dibalik Kebijakan Uni Eropa dalam Mengatasi Krisis Finansial Yunani Tahun 2010-2012. Penelitian ini membahas mengapa Uni Eropa membantu Yunani menangani krisis, padahal Yunani sudah melanggar ketentuan organisasi Uni Eropa, sehingga seharusnya tidak layak dibantu. Penelitian ini dapat membantu peneliti menambah analisis mengapa Uni Eropa terus membantu Yunani hingga memberikan tiga kali *bailout* bahkan bersikeras mempertahankan Yunani ketika muncul desakan *Grexit* dari masyarakat Yunani sendiri.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah ada akan terletak pada fokus masalahnya. Peneliti akan membahas secara spesifik mengenai hubungan Yunani dengan Uni Eropa pasca krisis Yunani yang terjadi, dengan menganalisis dari dampak eksternal krisis Yunani yang sangat melemahkan stabilitas ekonomi Uni Eropa, lalu keterlibatan Uni Eropa dalam membantu Yunani, yang kemudian dikaitkan dengan munculnya desakan *Grexist*, serta kepentingan-kepentingan Uni Eropa mengapa terus mempertahankan Yunani di Uni Eropa.

Terkait dengan hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani terjadi, peneliti tertarik untuk membahas mengapa Uni Eropa yang telah mengalami penurunan stabilitas ekonomi karena Yunani tetap membantu dan mempertahankan Yunani, meskipun Yunani telah melanggar ketentuan organisasi dari awal masuk Uni Eropa, jauh sebelum krisis ini terjadi, terlebih ketika krisis terjadi Yunani menerima bantuan yang sangat besar dari Uni Eropa. Peneliti mengangkat judul penelitian yaitu **“Hubungan Yunani dan Uni Eropa Pasca Krisis Yunani Tahun 2010”**

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, diantaranya adalah:

1. Ekonomi Politik Internasional

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana hubungan antara fenomena ekonomi dan politik yang terjadi pada negara, relevan dengan fenomena krisis Yunani yang terjadi, dimana krisis ini adalah suatu masalah kompleks yang terjadi atas masalah ekonomi dan masalah politik dalam pemerintahannya.

2. Organisasi Internasional

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana suatu organisasi internasional juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional yang terbentuk dari kesamaan kepentingan atau tujuan dari berbagai negara. Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional melaksanakan perannya dengan memberikan bantuan ketika Yunani mengalami krisis.

3. Regionalisme

Mata kuliah ini mempelajari bagaimana suatu wilayah atau kawasan sebagai dua atau lebih negara dapat membentuk integrasi atas dasar geografi, ekonomi, maupun budaya. Uni Eropa terbentuk atas berbagai kesamaan faktor yang kemudian dapat terbentuk menjadi suatu integrasi antarnegara. Dalam kasus ini, Yunani yang mengalami krisis berada pada kondisi yang sangat sulit. Ketika Yunani sebagai salah satu subsistem dari integrasi yang dibentuk oleh Uni Eropa sedang terpuruk, tentu hal ini akan berdampak pada negara-negara di sekitarnya.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengangkat pertanyaan rumusan masalah mayor untuk membatasi penelitian, yaitu:

“Bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani terjadi?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian dikembangkan menjadi beberapa rumusan masalah minor sebagai berikut:

1. Bagaimana stabilitas ekonomi Uni Eropa pasca krisis Yunani?
2. Bagaimana krisis Yunani mempengaruhi munculnya desakan *Greece Exit* (Grexit) dari Uni Eropa?
3. Mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan Yunani sebagai anggota Uni Eropa?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memiliki pembatasan masalah dalam tema dan waktu. Penelitian akan berfokus pada lingkup tema terkait krisis utang Yunani, Uni Eropa, dinamika yang terjadi selama masa krisis, serta hubungan antara keduanya. Sedangkan pembatasan waktu yaitu tahun 2010 hingga 2018 dengan alasan tahun 2010 adalah titik awal krisis Yunani, hingga tahun 2018 dengan asumsi diharapkan dapat menjadi batas analisis waktu terkini.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana hubungan Yunani dan Uni Eropa pasca krisis Yunani terjadi sejak tahun 2010.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui stabilitas ekonomi Uni Eropa pasca krisis Yunani
2. Mengetahui bagaimana krisis Yunani mempengaruhi munculnya desakan *Greece Exit* (Grexit) dari Uni Eropa
3. Mengetahui mengapa Uni Eropa tetap mempertahankan Yunani di Uni Eropa

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penerapan dari beberapa teori yang sudah peneliti pelajari, yaitu teori tentang hubungan internasional, organisasi internasional, ekonomi politik internasional, serta krisis ekonomi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu menambah wawasan keilmuan bagi peneliti, memberikan referensi bagi pembaca, dapat dijadikan pembanding dan tolak ukur untuk penelitian selanjutnya yang memiliki tema atau topik yang berkaitan, dan menjadi sumbangan pemikiran bagi studi ilmu hubungan internasional.